

## **Tinjauan Komunikasi Publik Lembaga Audit Sektor Publik**

**Rahayu Alkam**<sup>1</sup>✉ Amar Sani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar, <sup>2</sup>Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan meninjau komunikasi publik lembaga audit sektor publik dalam kaitannya dengan penguatan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Analisis mencakup sejumlah aspek yang terkait dengan gaya dan strategi komunikasi publik BPK dan pelibatan publik sebagai upaya komunikasi efektif. Data diperoleh dengan menggunakan perspektif tujuh orang auditor BPK yang berpengalaman. Pertanyaan semi terstruktur digunakan sebagai instrumen dalam melakukan wawancara mendalam. Analisis data kualitatif dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi publik BPK cenderung bersifat konservatif, standar, dan berbeda dengan KPK terutama dalam strategi publisitas di media. BPK telah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik akan peran, tugas, dan eksistensi BPK melalui saluran komunikasi yang dimiliki dan aktivitas-aktivitas edukatif. BPK diharapkan lebih proaktif mengoptimalkan saluran komunikasi yang mudah dijangkau publik dalam mendiseminasikan hasil pemeriksaan dan lebih melibatkan publik dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian empiris mengenai topik komunikasi audit sektor publik Indonesia. Penelitian mendatang dapat melakukan kajian topik yang sama namun dengan cakupan isu yang lebih komprehensif melalui pendekatan yang berbeda terutama dengan melibatkan pemangku kepentingan lain dalam organisasi audit sektor publik.

**Kata Kunci:** audit sektor publik, komunikasi publik, BPK, media

### **Abstract**

*This research aims to review public sector audit public communication institutions in relation to strengthening the role of oversight, insight, and foresight. The analysis covers number of aspects related to BPK's public communication style and strategy, besides public engagement as an effective communication effort. Data was obtained using the perspective of seven experienced BPK auditors. Semi-structured questions were used as an instrument in conducting in-depth interviews. Qualitative data analysis was carried out in order to answer the research questions. The research results reveal that the BPK's public communication tends to be conservative, standard, and different from the KPK, especially in its publicity strategy in the media. BPK has attempted to increase public awareness and understanding of the role, duties and existence of BPK through its communication channels and educational activities. The BPK is expected to be more proactive in optimizing communication channels that are easily accessible to the public in disseminating audit results and involving the public more in the audit process. This research is expected to provide an empirical study on the topic*

of communication in the Indonesian public sector audit context. Future research can study the same topic but covering more comprehensive issues through a different approach, especially by involving other stakeholders in public sector audit organizations.

**Keywords:** public sector audit, public communication, BPK, media.

Copyright (c) 2024 **Rahayu Alkam**

✉ Corresponding author :

Email Address : rahayu.alkam@unm.ac.id

## PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa keuangan negara. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola demokrasi. Peran penting BPK dalam amanat pemeriksaan keuangan negara tidak hanya dalam bentuk pengawasan keuangan (*oversight*), tetapi juga harus mampu memberi wawasan mengenai kebijakan publik (*insight*), dan memberi tinjauan atas alternatif masa depan (*foresight*). Peran krusial BPK sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) ini dapat diwujudkan salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan hasil pemeriksaan.

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK harus mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan khususnya pengguna dari hasil audit. Dalam praktiknya, pengguna utama dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah auditan yang terdiri dari entitas-entitas sektor publik. Komunikasi positif dengan auditan juga menjadi hal penting yang berusaha ditingkatkan BPK dalam rangka memaksimalkan upaya tindak lanjut dan perbaikan dari entitas pemeriksaan mengingat indeks kepuasan auditan atas kinerja pemeriksa BPK mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu dari angka 4,24 di tahun 2016 menjadi 4,26 di tahun 2019 (BPK, 2020). Selain entitas sektor publik, distribusi hasil pemeriksaan yang bersifat wajib juga dilakukan kepada pemangku kepentingan utama lain yaitu rakyat yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Publik secara luas belum menjadi target utama distribusi dan diseminasi hasil pemeriksaan. Hal ini ditengarai menimbulkan kesenjangan antara publik dan hasil-hasil pemeriksaan sektor publik sehingga peran-peran krusial lembaga audit sektor publik terutama dalam memberikan *insight* dan *foresight* melalui kebermanfaatan hasil pemeriksaan dinilai belum optimal.

Kesenjangan yang timbul tidak saja terkait pemanfaatan hasil pemeriksaan, tetapi juga menyangkut kesadaran dan pemahaman masyarakat akan fungsi, peran, dan kinerja dari lembaga audit sektor publik/BPK. Hal ini ditandai dengan belum masifnya diskursus publik terkait nilai maupun kinerja BPK di media dan kaburnya pemahaman akan peran dan fungsi BPK, yang justru sering dipersamakan dengan lembaga lain seperti KPK. Minimnya kesadaran dan pemahaman publik ini tentu dapat menghambat optimalisasi peran-peran BPK.

Kesenjangan yang timbul hakikatnya dapat dihubungkan melalui komunikasi publik yang efektif. Melalui komunikasi publik, masyarakat luas dapat membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan lembaga audit sektor publik. Keterlibatan publik luas dalam beberapa tahapan pemeriksaan tentu dapat mengoptimalisasi

*impact* dari pemeriksaan itu sendiri. Selain itu, kemampuan untuk mengembangkan kapasitas komunikasi yang lebih baik dengan berbagai *pemangku kepentingan* terkait nilai, peran, dan hasil kerja SAI merupakan salah satu alat yang dapat meningkatkan efektivitas SAI sehingga dapat mengoptimalkan kontribusi SAI kepada masyarakat (Bhatnagar & Sharma, 2016). Bahkan, Transparency International (TI) menjadikan isu komunikasi seperti aksesibilitas publik terhadap laporan audit dan komunikasi dengan parlemen sebagai salah satu tolok ukur efektivitas SAI. Dalam rencana strategis BPK sendiri, juga telah ditetapkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik sebagai indikator atas sasaran program berupa meningkatnya komunikasi dan pengelolaan informasi secara terkoordinasi dan berkualitas (BPK, 2020).

Utilisasi berbagai media komunikasi publik baik yang bersifat konvensional (*mainstream*) maupun media terbaru seperti media sosial telah dilakukan oleh BPK. Namun, hal ini belum menjamin efektivitas dari komunikasi publik yang dilakukan. Nasution (2023) menyatakan bahwa manfaat keberadaan audit sektor publik berupa peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dapat menjadi tidak optimal jika keterampilan pelaporan dan komunikasi publik lembaga audit sektor publik tidak memadai.

Ada berbagai aspek yang perlu ditinjau terkait dengan komunikasi publik BPK yaitu gaya dan strategi komunikasi, perbandingan strategi komunikasi dengan lembaga lain seperti KPK, dan upaya meningkatkan komunikasi efektif dengan keterlibatan publik dalam rangka memaksimalkan kemanfaatan dan eksistensi audit sektor publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis gaya dan strategi komunikasi publik BPK dalam upaya meninjau efektivitas dari komunikasi publik yang telah diimplementasikan.

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah tinjauan pustaka, dan bagian ketiga adalah metode penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan terdapat pada bagian keempat sementara kesimpulan dan saran berada pada bagian kelima.

## 1. Landasan Teori

### a. Audit sektor publik

Pemeriksaan keuangan negara didefinisikan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan negara bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai melalui proses pemeriksaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, 2017). Audit sektor publik juga diartikan sebagai suatu proses sistematis yang secara objektif dilakukan untuk menguji keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan oleh organisasi sektor publik dalam suatu laporan keuangan (Bastian, 2015).

### b. Komunikasi Publik Audit Sektor Publik

Secara umum, strategi komunikasi dari institusi publik dapat berfokus pada dua cara yaitu komunikasi yang memenuhi tujuan strategis organisasi dan komunikasi sebagai pusat strategi organisasi (Canel, 2007 dalam (González-Díaz et al., 2012) ). Teknik komunikasi SAI umumnya dibedakan menjadi komunikasi internal, yaitu komunikasi di dalam internal SAI, dan komunikasi eksternal yaitu alat untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan parlemen, publik, auditor, dan profesional (Bhatnagar & Sharma, 2016).

González et al. (2008) telah mengelaborasi alasan bagi SAI untuk perlu memiliki strategi komunikasi yaitu:

- a) Kapasitas dari lembaga publik untuk mendemonstrasikan hasil dari aktivitasnya merupakan upaya untuk menjustifikasi keberadaan lembaga,
- b) Kebebasan SAI untuk menentukan kebijakan komunikasi kepada media dan publik akan menjadi komponen penting atas independensi dan efisiensi institusi,
- c) Kebijakan komunikasi akan menjadi ukuran penilaian atas *impact* institusi,
- d) Kebijakan komunikasi dapat secara positif mempengaruhi kepatuhan SAI terhadap regulasi kebebasan informasi,
- e) Minimnya kebijakan komunikasi akan memberikan kesan usang pada institusi yang akan membuat eksistensi dan kinerjanya dipertanyakan.

ISSAI telah menekankan dalam salah satu prinsipnya bahwa SAI harus mampu berkomunikasi secara tepat waktu dan meluas atas aktivitas pemeriksaan melalui berbagai media, situs web, dan alat lainnya. Selain itu, dalam rencana strategis BPK, komunikasi dengan manajemen dan pemangku kepentingan menjadi salah satu domain dalam kerangka pengukuran kinerja SAI. Domain ini mengatur pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

### c. Penelitian terdahulu

Bhatnagar & Sharma (2016) yang melakukan tinjauan atas komunikasi publik SAI India menyadari bahwa komunikasi eksternal kepada pemangku kepentingan merupakan faktor penting bagi SAI dalam perannya untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, ditekankan bahwa minimnya pandangan akan pentingnya komunikasi efektif antara institusi audit nasional dan publik telah mengaburkan dan menimbulkan mispersepsi mengenai fungsi dari SAI itu sendiri. Untuk konteks India, informasi dan diskusi terkait konten dari laporan audit baik di media cetak maupun elektronik masih sangat minim. Jika ada, konten yang disorot umumnya mencakup *fraud* atau kesalahan dari institusi pemerintah sementara berbagai observasi dan masukan penting dari hasil audit sangat jarang diperhatikan publik. Meski demikian, SAI India sudah bersikap lebih proaktif untuk menjadi institusi yang lebih terbuka, akuntabel, dan transparan melalui strategi komunikasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan dan publik yang luas.

Lebih lanjut, SAI India melalui rencana strategisnya telah menetapkan sejumlah tolok ukur dalam upaya peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan yaitu: merencanakan kebijakan media yang tepat, diseminasi yang lebih luas atas laporan audit, membentuk unit penghubung parlemen, menarik perhatian masyarakat pada produk institusi melalui standarisasi, menyediakan produk bernilai tambah selain laporan audit kepada entitas pemerintah, menyelenggarakan serangkaian seminar di berbagai daerah, dan meningkatkan aksesibilitas laporan audit kepada berbagai pemangku kepentingan (Bhatnagar & Sharma, 2016).

Meningkatkan publisitas media menjadi salah satu upaya SAI untuk memaksimalkan komunikasi publik. Namun, Bringselius (2014) telah mengidentifikasi tiga risiko dari strategi diseminasi yang terlalu berfokus pada memaksimalkan liputan media atas hasil audit SAI yaitu audit kinerja justru berfokus pada kepatuhan; fokus pada hal negatif dalam pemilihan area, target, dan penarikan kesimpulan audit; dan pelanggaran terhadap politik dan penyusunan kebijakan. Studi kasus Bringselius (2014) tersebut menunjukkan bahwa ketiga risiko yang diidentifikasi telah terjadi pada Kantor Audit Nasional Swedia (SNAO) karena menggunakan strategi diseminasi dengan liputan media yang maksimal sehingga mengakibatkan posisi yang terlalu kritis terhadap eksekutif, yang dapat menantang netralitas dan independensi SAI. Penelitian tersebut juga mengimplikasikan bahwa SNAO yang dikenal independen dan mengambil posisi kritis terhadap eksekutif menghendaki liputan media yang tinggi demi mencari dukungan ke masyarakat. González-Díaz et al. (2012) telah menegaskan bahwa SAI perlu menimbang tingkat kepentingan informasi sebelum memutuskan bentuk respon terhadap media apakah *press conference* atau *press statement*.

González-Díaz et al. (2012) telah mengembangkan strategi komunikasi bagi SAI agar mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya terhadap kelompok pengguna yang menjadi target. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa SAI harus berfokus pada tiga hal mendasar yaitu, target audiens, pesan, dan saluran komunikasi. Selain itu, SAI dinilai perlu untuk menargetkan strategi komunikasi kepada audiens yang lebih luas sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pesan-pesan yang beragam baik melalui media tradisional maupun media baru. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa cara suatu SAI mendesain strategi komunikasinya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem media dan tipe dari struktur SAI itu sendiri.

Salah satu target audiens utama dari SAI adalah parlemen yang menerima distribusi atas laporan audit. Oleh karena itu, SAI juga harus mendesain komunikasi yang efektif dengan parlemen. Penelitian Renata & Zoran (2019) telah mengaskan bahwa temuan dan rekomendasi audit hanya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor publik hanya jika terdapat hubungan yang kuat dan efektif antara SAI dan parlemen (tanpa mengurangi independensi SAI). Hal ini harus didukung oleh komunikasi SAI kepada parlemen yang harus lebih proaktif dan

komunikasi parlemen kepada SAI harus lebih fleksibel dengan menekankan pada kontinuitas komunikasi sehingga hubungan parlemen dan SAI dapat lebih efektif dan konstruktif.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian mengenai komunikasi publik BPK sebagai lembaga audit sektor publik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur kepada tujuh orang auditor BPK yang telah bekerja lebih dari sepuluh tahun di lembaga negara tersebut. Data yang diperoleh dari tujuh partisipan telah menunjukkan saturasi sehingga jumlah partisipan telah dianggap memadai untuk diproses lebih lanjut. Perspektif auditor dinilai penting karena aspek komunikasi publik juga terkait dengan pencapaian tujuan pemeriksaan yang mencakup *oversight, insight, foresight*. Melalui perspektif auditor BPK dapat diketahui sejumlah informasi terkait strategi komunikasi publik BPK dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan publik. Pertanyaan penelitian meliputi strategi komunikasi publik BPK terutama terkait gaya komunikasi BPK dan perbandingannya dengan KPK, serta upaya pelibatan publik yang juga merupakan pengguna *output* pemeriksaan. Rekam hasil wawancara kemudian ditranskrip untuk selanjutnya dikodekan pada kelompok-kelompok subtema dan tema dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1. Hasil

Partisipan penelitian telah mengungkapkan sejumlah informasi mengenai komunikasi audit sektor publik. Secara umum, realitas yang terungkap dikelompokkan dalam tiga poin yaitu;

#### **Gaya Komunikasi Publik BPK**

Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh sejumlah partisipan diketahui bahwa gaya komunikasi publik BPK bersifat konservatif, dan standar. Sifat-sifat organisasi lembaga audit sektor publik ini merupakan persepsi auditor berdasarkan pengalaman dalam proses pemeriksaan maupun persepsi auditor dalam menilai respon komunikasi BPK secara umum.

#### **Konservatif**

Beberapa isu yang terkait dengan gaya konservatisme BPK adalah kerahasiaan data dan risiko penyalahgunaan hasil pemeriksaan. Sejumlah partisipan menekankan bahwa berbagai produk BPK tidak dapat menjadi konsumsi publik karena bersifat rahasia terutama untuk hasil pemeriksaan yang bersifat belum final. Selain tingginya risiko penyalahgunaan atas hasil pemeriksaan, publisitas atas hasil pemeriksaan yang belum final juga dapat berdampak terhadap proses pemeriksaan.

*Kalau soal itu, tidak semua produk dari BPK itu untuk konsumsi publik. Ada hal-hal yang bisa jadi konsumsi publik ada juga yang mungkin sifatnya rahasia. Mungkin kenapa bisa kaku itu karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita (BPK) harapkan. Apalagi misal terkait LHP BPK yang belum*

*diserahkan. Itu bisa berbahaya kalau publik tahu lebih dulu sebelum yang bersangkutan maksudnya yang entitasnya. A1*

*Selain itu, di BPK..., masih ada kekhawatiran untuk mengungkapkan hal-hal yang belum pasti. A3*

*Memang kalau BPK tiap semester kita melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan, memang sudah final baru dipublikasikan. Bukan saat pemeriksaan masih berjalan kita gambar gembor, kita tidak seperti itu memang. Mungkin strateginya komunikasinya memang berbeda. A4*

Namun, terdapat juga persepsi partisipan yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa informasi yang sebenarnya dapat dibagikan kepada publik selama proses pemeriksaan misalnya mengenai proses dan prosedur audit yang dijalankan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman publik atas pemeriksaan yang dilakukan BPK.

*Sebenarnya di BPK hal-hal seperti ini sangat dijaga sekali, tapi mungkin juga berlebihan karena menurut saya tidak apa-apa beberapa proses yang sudah kita lakukan diumumkan ke publik, sebenarnya sah-sah saja walaupun belum selesai kita tetap bisa mengumumkan proses dan prosedur apa saja yang sudah kita jalankan, misal kita sudah lakukan pemeriksaan fisik, kita sudah melakukan apa misalkan, tanpa mengungkap hasil karena memang hasilnya belum boleh diungkapkan. Mungkin itu yang masih kurang di BPK. Ada ketakutan berlebihan untuk mengungkapkan proses-proses yang sedang kita lakukan ke publik. A3*

*Sebenarnya saya juga bingung terkait ini, maksudnya khususnya terkait kebijakan BPK terhadap penyampaian informasi yang ada di Laporan Hasil Pemeriksaan. Maksudnya masyarakat perlu tahu kerja kita, hasilnya apa saja laporannya. Tapi BPK juga berada pada posisi yang dilematis... A6*

Sikap konservatif lembaga pemeriksa keuangan negara ini tidak hanya menyangkut publikasi hasil penelitian yang belum final tapi juga hasil pemeriksaan yang telah final. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa penyalahgunaan hasil pemeriksaan BPK di masa lalu. Penyalahgunaan hasil pemeriksaan misalnya dapat berupa mispersepsi atas temuan pemeriksaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemerasan kepada pejabat publik maupun publisitas negatif atas temuan yang bersifat administratif atau dapat diselesaikan dengan pengembalian kepada negara.

*Kadang dulu kejadian ada yang datang ke pejabat publik, karena ada temuan, langsung bikin ramai padahal sebenarnya administrasi. BPK tidak masalah, tapi kalau muncul di media bunyinya itu beda. Karena temuan administrasi oleh BPK itu secara teknis administrasi tapi kalau muncul di media itu bisa jadi beda... Ya dilemanya itu tadi. anggap setelah pemeriksaan BPK langsung publish secara rinci, oh ini ada temuan segini. Dari pengalaman dulu ternyata dari entitasnya sendiri yang akan kesulitan karena kalau ada temuan segini*

*biasanya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang biasanya malah jadi... A7*

*... Tapi BPK juga berada pada posisi yang dilematis ketika ingin lebih masif menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan itu ke publik diluar DPR RI/DPRD. Dulu sempat dibuka kanal informasinya. Jadi semua orang bisa mendownload begitu saja laporan hasil pemeriksaan. Namun ada side effect yang tidak diinginkan muncul ketika banyak juga LSM yang menggunakan itu, bahkan APH yang banyak oknumnya itu menggunakan LHP BPK untuk memeras. Tidak cuma LSM, bahkan APH itu, hal yang menurut kita pelanggaran nya bisa selesai dengan menyetorkan kembali, tapi oleh beberapa oknum APH itu dipergunakan untuk benar-benar memeras beberapa pejabat di daerah dll. Akhirnya karena kondisi kedilematisan itu, maka tetap laporan itu disampaikan ke publik tapi melalui DPR/DPRD. A6*

Maraknya peristiwa penyalahgunaan hasil pemeriksaan BPK di masa lalu membuat organisasi ini mengubah kebijakan dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan yang sebelumnya dapat diakses oleh publik secara bebas menjadi publikasi terbatas. Penyampaian hasil pemeriksaan secara langsung hanya kepada perwakilan rakyat yaitu DPR/DPRD sementara akses masyarakat luas yang ingin mengetahui hasil pemeriksaan baik misalnya untuk keperluan akademis maupun keperluan lainnya harus melalui prosedur tertentu.

*Sejak kejadian itu kalau tidak salah BPK tidak wajib lagi publish, sekarang posisinya BPK pasif, kalau ada yang perlu, minta ke BPK. Jadi kalau dulu memang wajib publish sekarang BPK pasif. A7*

### **Standar**

Komunikasi publik BPK juga bersifat terstandarisasi. Sifat ini termanifestasi dalam intensitas publikasi yang bersifat rutin yaitu per semester dalam bentuk IHPS maupun press rilis mengenai setiap pemeriksaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

*Kalau dilihat dari komunikasi yang rutin minimal tiap semester kita sudah mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. A4*

*Kalau dari segi regulasi atau peraturan perundang-undangan, komunikasi ya sudah seperti itu saja kalau untuk sekedar memenuhi regulasi dengan menyerahkan hasil pemeriksaan ke lembaga perwakilan, kemudian menyusun ihktisar hasil pemeriksaan semester yang juga disampaikan ke lembaga perwakilan... Kemudian terkait distribusi LHP dan IHPS tadi juga untuk menerapkan peraturan atau regulasi perundang-undangan. A5*

Selain itu, standarisasi komunikasi publik BPK juga dapat dilihat dengan keberadaan fungsi hubungan masyarakat (humas) sebagaimana organisasi pada umumnya. Selain itu, BPK juga telah membangun layanan pusat informasi dan komunikasi yang memungkinkan

masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik yang dibutuhkan melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

*Kalau komunikasi publik saya rasa baik-baik saja. Karena kita punya humas di kantor pusat. Jadi setiap apa-apa kita saling bertukar informasi komunikasi antar entitas. A2*

*..., humasnya memposisikan diri sebagai organisasi yang dikenal fungsinya dll. A6*

*Kalau pengembangan yang sifatnya standar misalnya dengan membangun pusat informasi dan komunikasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mencari informasi. PIK juga berfungsi sebagai PPID pejabat pengelola informasi dan komunikasi atau memberikan pelayanan informasi publik. Jadi pemerolehan informasi bisa dilakukan dengan datang ke PIK itu atau meminta informasi publik via website BPK yang nanti akan diarahkan ke PPID secara elektronik. Itu pengembangan yang sifatnya standar. A5*

Modernisasi media komunikasi publik juga dilakukan oleh BPK walaupun masih dalam level utilisasi yang bersifat standar. Pemanfaatan situs web dan media sosial menjadi penanda upaya modernisasi yang dilakukan BPK. Selain situs web, media sosial seperti *youtube, Instagram,* dan *Tiktok* juga dijadikan sebagai kanal informasi yang bisa diakses publik.

*Kemudian membangun website untuk mempublikasikan berbagai macam informasi saya kira itu hal yang konvensional dan sudah berlaku umum di berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga manapun. A5*

*Kalau mbak bisa akses youtube nya itu ..., sama dengan instagram sering juga ada informasi baru yang didapatkan. Cuma kalau di perwakilan paling medianya menggunakan web site saja. Cuma mungkin beritanya ya terkait audit saja. A2*

Partisipan menilai bahwa sudah terdapat upaya yang dilakukan oleh BPK dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menambah kanal-kanal informasi publik seperti media sosial. Hal ini juga dinilai merupakan upaya pemerataan peran kehumasan BPK. Namun pemanfaatan media komunikasi seperti situs web dan media sosial juga dinilai merupakan hal yang lumrah bagi sebuah organisasi saat ini. Apalagi, informasi yang dibagikan pada media tersebut masih bersifat standar.

*BPK sudah berusaha mendekatkan diri melalui social media, ada Instagram, youtube, dan tiktoknya. Cuma gaungnya belum kedengaran itu sepertinya masih ada beban-beban yang tidak terlihat. Tetapi kalau di daerah kita masih ada di koran. Cuma mungkin tidak terdengar secara nasional hanya di lingkup daerah saja, dan masih memerlukan wartawan. Isi tik-tok nya juga hanya bersifat hal yang lucu-lucu. A3*

*Sepertinya begitu, sebenarnya kalau untuk hasil itu hampir selalu ada di social media seperti youtube dan Instagram. ... Itu pasti ada penyerahan laporan kepada DPR/DPRD yang sudah berisi opini atas laporan keuangan dan kesimpulan apa, termasuk juga penyerahan IHPS. A3*

*Tapi dua tahun belakangan justru ada juga yang merasakan perubahan tentang masalah ini, kanal-kanal informasi yang bisa diakses oleh publik terkait kerja-kerja BPK itu semakin bertambah. Seperti instagram, tiktok, Youtube. Jadi dua tahun belakangan ini dibandingkan dengan dulu BPK sudah berusaha bertambah baik pemerataan peran kehumasannya. .. itu sudah jadi upaya yang maksimal yang dilakukan BPK untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. A6*

*Itu ada tapi media sosial seperti Instagram tiktok youtube itu tidak yang memblow up hasil pemeriksaan besar besaran, membuat kesan bombastis itu tidak. Jadi misal anda melihat media sosial kita itu tidak ada kasus seperti itu. Kita tidak mengangkat kasus. Jadi ya isu isu normal saja. A4*

Standarisasi komunikasi publik BPK juga dapat dilihat dari cara publikasi BPK di media-media *mainstream*. Sejumlah partisipan menilai BPK cenderung bersikap pasif dalam pemberitaan di media. Hal ini ditandai dengan pemberitaan di media yang bersifat rutin misalnya hanya terkait pemeriksaan keuangan yaitu pada saat awal pemeriksaan dan penyerahan hasil, serta *press* rilis dengan media untuk publikasi IHPS dan pemeriksaan tertentu. Pemberitaan mengenai BPK di luar rutinitas tersebut, biasanya hanya dalam rangka merespon kasus-kasus yang sedang menjadi perhatian publik.

*Harus memantau dulu kira-kira pemberitaan tentang BPK yang muncul apa di publik/media. Pertanyaannya pemberitaan itu muncul karena inisiatif BPK atau karena dampak lain. Misalnya ada kasus ternyata baru muncul BPK. Kalau normalnya kan pada saat penyerahan, beritanya muncul, atau mau mulai audit ada pemberitaan. Di daerah juga itu kebanyakan bukan dari BPK sendiri. A7*

*Disana ada kegiatan yang sifatnya terstandar atau baku misal dengan press rilis atau pertemuan dengan media secara periodic misal satu semester sekali untuk mempublikasikan informasi di IHPS atau topik-topik pemeriksaan tertentu. A5*

*Kalau kita lebih sering reaktif untuk kasus yang memang berkaitan dengan citra kita. A6*

Tidak bisa dipungkiri, media berperan penting dalam komunikasi publik BPK. Media merupakan salah satu pemangku kepentingan yang penting dalam upaya BPK meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik terkait pemeriksaan keuangan negara. Hanya saja, pemberitaan media terhadap hasil pemeriksaan BPK dinilai belum masif dan optimal. Padahal isu-isu seperti jumlah pengembalian uang negara dari hasil pemeriksaan

BPK tidak hanya meningkatkan citra BPK tapi juga dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya fungsi pemeriksaan keuangan negara. Hal ini tidak terlepas dari eksposur media yang cenderung diarahkan pada isu-isu besar yang bisa menarik perhatian publik. Publisitas terkait BPK biasanya akan meningkat ketika terjadi pemeriksaan tematik atas isu yang menjadi sorotan publik.

*Cuman dimedia kok lebih banyak isu-isu yang bombastis, kok misalnya gaungnya lebih besar KPK. Kalau BPK kan tiap semester kita sampaikan bahkan di tiap kabupaten itu kita sampaikan bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan ini, di situ bahkan bisa terlihat berapa kerugian negara yang dikembalikan, kerugian pembayaran yang dikembalikan, itu nilainya tidak kecil. Cuma mungkin media lebih cocok dengan isu-isu yang bombastis jadi yang besar tapi tidak terlalu bombastis ya mungkin tidak akan diangkat. A4*

*Jadi tidak langsung serta merta, kecuali ada kegiatan atau pemeriksaan tematik, jadi secara keseluruhan dari pusat dan perwakilan memeriksa yang sama dan mungkin terkait dengan isu yang sedang berkembang. Nah kalau terkait isu yang sedang berkembang pasti media cepat, gaungnya bisa lebih kedengaran. Tapi kalau pemeriksaan local/LPKD yang rutin mungkin gaungnya kurang terlalu kedengaran. A2*

Standarisasi komunikasi publik BPK yang lain dapat dilihat dari aspek prosedural dalam pemorelhan informasi publik di BPK. Sifat ini diungkapkan partisipan saat memaparkan prosedur yang harus ditempuh publik untuk mendapatkan hasil pemeriksaan seperti dokumen LHP. Kebijakan BPK yang berubah dari aktif mempublikasikan LHP menjadi lebih pasif adalah dalam rangka memitigasi risiko penyalahgunaan hasil-hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

*Cuma untuk dokumen publik, saya rasa tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Tinggal bersurat ke BPK nanti akan dibantu, tapi tentunya ada syarat-syaratnya misalnya untuk keperluan apa. A1*

*Selain itu, di BPK kita masih sangat prosedural, masih ada kekhawatiran untuk mengungkap hal-hal yang belum pasti. A3*

*Sedangkan kalau ada masyarakat yang mau mengakses itu sepanjang alasannya jelas ya mereka harus bersurat. Jadi disediakan mekanismenya, masyarakat umum juga boleh tapi tetap harus jelas untuk apa jadi biar tidak jadi boomerang juga. A6*

*Kalau ada yang perlu, minta ke BPK. .... Kalau ada yang perlu selama dibolehkan oleh ketentuan umum ya diberikan. A7*

#### 1.1.1. Perbedaan Strategi Komunikasi Publik BPK dan KPK

Gaya komunikasi publik BPK tidak terlepas dari perbandingan gaya komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah partisipan menekankan perbedaan fundamental yang membedakan intensitas publikasi antara BPK dan KPK yaitu terkait dengan strategi komunikasi

BPK yang hanya membolehkan publikasi atas hasil pemeriksaan yang telah final sementara strategi komunikasi KPK membolehkan publikasi yang intens atas kerja-kerja yang masih progresif. Selain itu, terdapat perbezaan mendasar atas fungsi dan peran kedua organisasi ini yang juga membezakan gaya komunikasi publik yang digunakan.

Sifat komunikasi BPK umumnya dibatasi oleh kewenangan dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan. BPK tidak akan mempublikasikan hasil pemeriksaan yang belum final kepada publik. Oleh karena itu, output BPK disebut bersifat final karena hanya mengungkapkan fakta-fakta dan bukan isu. Publikasi atas progres pemeriksaan yang dilakukan maupun hasil yang belum final ke media dinilai auditor tidak akan memberikan manfaat dalam kaitannya dengan peningkatan mutu audit.

*Kalau untuk isu yang lain, karena BPK bukan KPK, jadi tidak secara gamblang menyampaikan ke publik kalau memang belum hasil final. Kalau BPK kan outputnya bersifat final, tidak seperti KPK kalau KPK setahu saya ketika mereka ada isu apa kemudian mereka press conference kasusnya, baru mereka perdalam lagi, itu mereka melakukan gong di awalnya dulu, BPK setahu saya kami berproses dulu, jadi yang kami sampaikan ke publik bukan isu-isu tapi berupa fakta... Sifat komunikasi publik BPK itu sifatnya final. A1*

*... sebenarnya saya secara pribadi ada kritik terhadap komunikasi publik KPK. Memang membuat gaungnya lebih terdengar tapi ada yang tidak pas sebenarnya, karena mereka suka mem-blow up sesuatu yang belum final. Bahkan penetapan sesuatu misal penetapan tersangka yang belum pernah mengkonfirmasi atau memanggil pihak-pihak terkait, tapi tau-tau tersangka sudah diumumkan di TV. ... Sebenarnya di BPK hal-hal seperti ini sangat dijaga sekali. A3*

*Tapi isu yang anda tadi sampaikan misalnya oh kami di lapangan sedang melakukan audit apa, lalu ada indikasi temuan ini, itu saya kira benefitnya apa, apakah hanya meningkatkan citra, rating supaya ramai, itu saya tidak melihat benefit secara langsung terhadap mutu audit... A5*

Gaya komunikasi yang berbeda ditunjukkan oleh KPK. Menurut perspektif auditor BPK, KPK cenderung mengangkat publisitas atas pemeriksaan kasus yang masih berjalan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bisa mempublikasikan progress pekerjaan yang dilakukan. Sejumlah partisipan mengkritik pendekatan yang digunakan KPK dan mempertanyakan manfaatnya.

*Ya bedanya mungkin seperti itu, misal KPK tangkap tangan itu nanti kasus masih berjalan, pemeriksaan masih berjalan, penyidikan masih berjalan, itu isunya akan diangkat terus. Memang kalau BPK tiap semester kita melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan memang sudah final baru dipublikasikan. Bukan saat pemeriksaan masih berjalan kita gambar gembor, kita tidak seperti itu memang. Mungkin strategi komunikasinya memang berbeda. A4*

*Ya memang kalau dari aspek penegakan hukum, dibandingkan dengan penegak hukum memang mereka (KPK) ketika di tahap inocestigasi atau pekerjaan lapangan mereka sudah bisa mempublikasikan progresnya. .... Saya tidak terlalu paham dari aspek kemediaan itu apa benefitnya. Apakah hanya akan meningkatkan citra organisasi atau memang untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Padahal sebetulnya tidak juga karena informasi dari masyarakat hanya petunjuk saja... A5*

Perbedaan strategi komunikasi ini menyebabkan publikasi KPK di media yang lebih intens jika dibandingkan dengan publikasi terkait BPK. Beberapa partisipan mengakui bahwa hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan media yang menyukai publikasi atas isu-isu yang bisa menarik perhatian publik terutama isu korupsi pejabat publik. Selain itu, faktor kewenangan KPK yang memungkinkan publikasi hasil yang belum final juga memungkinkan media untuk lebih intens melakukan publikasi sepanjang perkembangan kasus. Eksposur media yang intens terkait KPK secara langsung telah meningkatkan popularitas KPK di masyarakat.

*Cuma dimedia kok lebih banyak isu-isu yang bombastis, kok misalnya gaungnya lebih besar KPK. ... Cuma mungkin media lebih cocok dengan isu-isu yang bombastis jadi yang (nilai kerugian) besar tapi tidak terlalu bombastis ya mungkin tidak akan diangkat. A4*

*Kesannya sedikit isu-isu yang beredar terkait dengan BPK atas entitas ataupun masyarakat karena kamipun dibatasi oleh kewenangan itu. A1*

*Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa KPK adalah media darling dibandingkan BPK. Hal tersebut itu bisa terjadi karena memang fungsi yang dimiliki oleh KPK jauh berbeda dengan BPK sehingga sangat mungkin sekali apa-apa yang mereka lakukan menjadi konsumsi media sehingga merekalah yang akan sering muncul dan dibaca oleh masyarakat. Seperti kalau main bola, yang memberi assist itu kalah tenar dengan yang membuat gol. A6*

Lebih lanjut, partisipan juga menilai bahwa masih terdapat mispersepsi atas peran dan fungsi BPK yang seringkali dianggap sebagai lembaga pemberantas korupsi seperti KPK sehingga kinerja dari kedua institusi ini sering diperbandingkan misalnya terkait intensitas publikasi di media. Padahal terdapat perbedaan peran dan fungsi dari kedua lembaga negara ini.

*Sehingga sering kali kita dibentu-benturkan antara BPK dan KPK, seolah-olah BPK juga institusi yang bertugas memberantas korupsi. Seolah-olah begitu, tumpang tindih dengan KPK. Makanya KPK terdengar lebih hebat karena sering muncul di TV dengan gaungnya yang luar biasa itu. A3*

*Balik lagi ke peran BPK ini yang sangat berbeda jauh dengan KPK. A1*

#### 1.1.2. Keterlibatan Publik dalam Audit Sektor Publik

Strategi komunikasi publik BPK juga terkait erat dengan kebermanfaatan hasil pemeriksaan BPK bagi masyarakat luas. Sejumlah partisipan

mengungkapkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Meski demikian, auditor menyadari bahwa pemahaman masyarakat terkait pemeriksaan keuangan dan BPK masih belum memadai. Selain itu, partisipasi publik dalam pemeriksaan keuangan negara masih bersifat tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat sebagai pemangku kepentingan utama khususnya terkait distribusi hasil pemeriksaan.

*Cuma sebagai masyarakat mungkin tahunya BPK saat turun ke lapangan itu, saat diperiksa itu. Misal saat memeriksa BLT dana desa langsung di desa, masyarakat jadi tahu ada BPK. A2*

*Hanya mungkin tingkat pemahaman publik secara umum terkait apa yang dilakukan BPK memang masih belum terlalu mapan dan fasih. A3*

*Memang kita tidak menggembor-gemborkan atau tidak menginformasikan secara luas terkait apa yang kita audit karena pemangku kepentingan kita itu yang kita langsung audit mungkin yang tahu itu pasti bupati, DPRD, pasti tahu. Jadi tidak langsung serta merta, kecuali ada kegiatan atau pemeriksaan tematik. A2*

Pelibatan publik dalam proses pemeriksaan masih bersifat tidak langsung. Selain dalam proses penyampaian hasil pemeriksaan yang diwakili oleh lembaga legislatif, proses perencanaan pemeriksaan juga belum melibatkan publik secara langsung. Perencanaan strategis dari BPK sendiri walau memperhatikan kebutuhan dan isu-isu publik namun menurut partisipan belum melibatkan masyarakat luas secara langsung dalam perumusannya misalnya melalui survey. Analisis kebutuhan masyarakat dianggap telah diakomodasi dalam perumusan rencana pembangunan pemerintah.

*Tidak cuma ditekankan ke auditor tapi juga termasuk ada unit studi di BPK itu ada namanya PSMK (Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja), mirip dengan LITBANG walaupun bukan fungsi LITBANG tapi PSMK memanfaatkan hal hal seperti itu untuk merumuskan apa yang perlu menjadi topik pemeriksaan. Tapi mereka belum langsung engage ke masyarakat, contohnya mereka bikin survei kira-kira pelayanan publik apa yang perlu ditekankan. Saya sejauh ini belum pernah mendengar itu dilakukan. Tetapi kalau mau bicara RPJMN Pemerintah Pusat itu sudah merangkum hal-hal apa yang akan dilakukan pemerintah dan itu juga berdasarkan kebutuhan masyarakat. A6*

Ide pelibatan publik secara luas dalam tahap perencanaan pemeriksaan dinilai sejumlah partisipan merupakan hal yang positif. Pelibatan kelompok masyarakat tertentu seperti akademisi dan pemerhati isu sosial dapat memberikan nilai tambah dalam perumusan perencanaan pemeriksaan BPK. Walaupun sejumlah partisipan masih merasa skeptis dalam pelibatan publik dalam proses perencanaan yang panjang.

*Kalau BPK sepertinya belum ada, perencanaan pemeriksaan itu kalau yang dimaksud publik di sini seperti masyarakat luas itu belum ada. Kalau misalnya*

*nanti dibuka bisa jadi itu hal positif terutama masukan dari akademisi, pemerhati isu-isu sosial, atau anggaran itu mungkin lebih bagus lebih memberi masukan banyak. A4*

*Jadi sebetulnya tidak salah juga kalau misalnya tadi seperti ANAU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan dan memberikan input. Jadi itu sangat memungkinkan juga menurut saya, walaupun sekarang ada mekanisme juga untuk itu, misal mekanisme whistleblowing system ... Tapi saya tidak melihat itu sebagai mekanisme terstandar dalam audit planning. Tapi di BPK sebenarnya juga ada kegiatan untuk menginventarisir berita-berita terkait dengan pengelolaan keuangan negara dulu disebut klipping. Itu memang diharapkan untuk menjadi input dalam kegiatan pemeriksaan. Tapi memang belum melakukan yang sifatnya melibatkan publik dalam perencanaan audit. A5*

*Kalau melibatkan publik dalam perencanaan itu, agak ini. Karena di bagian perencanaan itu agak panjang. Jadi bisa saja untuk pemeriksaan 2023 itu sebenarnya sudah disusun dari tahun 2020. Jadi samalah dengan garis besarnya dari restranya pemerintah dulu awalnya nanti di dalam situ bagaimana terkait dengan BPK ya itu kita ikuti. A7*

Lebih lanjut, perbandingan dengan Supreme Audit Institution (SAI) negara lain juga diungkapkan oleh partisipan. Partisipan menekankan bahwa publik telah dilibatkan dalam perencanaan pemeriksaan ANAU (SAI Australia). Pelibatan publik ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan pada tahap perencanaan audit. Masyarakat bisa menyampaikan isu atau masalah yang dirasakan sebagai bahan pemeriksaan untuk ANAU. Pelibatan publik dalam tahap ini, menurut partisipan belum dilakukan secara langsung di BPK. Namun, partisipan lain mengungkapkan bahwa BPK sudah mengadopsi cara-cara kerja ANAU dalam menentukan topik-topik pemeriksaan utamanya pemeriksaan kinerja.

*Cuma memang ada beberapa hal yang bisa di benchmark dari BPK negara lain. Misalnya dari ANAU atau Australi, di sana itu tidak hanya mempublikasikan result atau hasil tapi di sana juga bisa untuk meminta opini dari masyarakat ketika ANAU akan melakukan audit. .... Itu yang saya lihat belum di BPK. Jadi engagement public untuk terlibat di suatu pemeriksaan itu belum, lebih kepada pengenalan BPK secara umum melalui public awareness tadi atau publikasi dan diseminasi hasil kerja. A5*

*Saya pikir mereka sudah melakukan itu, bukan sesuatu yang akan dilakukan ke depan karena ANAU juga menjadi mentor BPK. ... jadi pola pemeriksaan kinerja yang dilakukan ANAU juga BPK adopsi termasuk dalam hal melakukan perencanaan terhadap topik-topik pemeriksaan apa yang dilakukan BPK ke depan, khususnya pemeriksaan kinerja. A6*

Adapun strategi BPK dalam aspek peningkatan pemahaman dan kesadaran publik, akan BPK, adalah secara aktif melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui program *public awareness* tentang peran dan tugas BPK. Selain itu, BPK juga berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai keuangan negara melalui program Akuntabilitas untuk Semua (*Accountability for All*) (BPK, 2020). Perwujudan dari program ini terlihat pada pendekatan yang lebih menysasar kepada kalangan akademisi di perguruan tinggi sebagai pengguna hasil pemeriksaan utamanya dalam rangka penelitian. Hubungan komunikasi dengan akademisi terwujud dalam berbagai kegiatan baik BPK yang berinisiatif melakukan kunjungan ke kampus-kampus maupun BPK yang menerima kunjungan studi kampus-kampus maupun permintaan data untuk keperluan penelitian. Selain akademisi, partisipan juga menilai media sebagai pemangku kepentingan penting dalam peningkatan *public awareness*. Upaya BPK dapat terlihat kegiatan yang sifatnya terstandar misal rilis pers rutin atau periodik terkait dengan publikasi IHPs ataupun topik-topik pemeriksaan tertentu.

*Kemudian public awareness misalnya ke siapa, tentunya ada berbagai macam pemangku kepentingan yang diidentifikasi kalau terkait dengan public awareness misalnya dengan media yang mempublikasikan informasi atau berita. ... Kemudian pemangku kepentingan lain misalnya mahasiswa, kita juga open ke perguruan tinggi yang akan melakukan studi ke BPK atau BPK juga berinisiatif untuk melakukan public awareness ke kampus-kampus. Ini polanya variative saja,.. Itu pemangku kepentingan kunci yang BPK usahakan untuk semakin menyebarluaskan dan meningkatkan public awareness. A5*

*Strategi publik kan juga ini, kadang yang lebih diarahkan bukan ke masyarakat umum malah lebih ke misalnya pimpinan kita berbicara ke kampus-kampus. Itu lebih ini, karena lebih ini untuk brainstorming-nya pelajar. Setahu saya memang ada jadwalnya setiap tahun untuk ke kampus-kampus. Kalau di sulsel dulu itu komunikasi publiknya dia mengadakan cerdas cermat tentang BPK antar SMA, kalau mau ikut jadinya belajar dulu. Sosialisasi juga. Atau sebelum pandemi ada bakti sosial atau apalah. A7*

## Pembahasan

Komunikasi publik yang dijalin oleh BPK terutama secara eksternal yaitu kepada para pemangku kepentingan dapat diidentifikasi melalui gaya komunikasi yang konservatif dan standar. Gaya konservatif dan terstandarisasi ini tidak terlepas dari batasan kewenangan dan risiko penyalahgunaan informasi atas publikasi hasil pemeriksaan. Walaupun BPK telah memublikasikan output pemeriksaan dalam website BPK dalam bentuk ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran, namun BPK menyadari belum mempunyai mekanisme publikasi yang memudahkan masyarakat mengakses dan memahami temuan pemeriksaan signifikan. Upaya penyediaan informasi dan akuntabilitas dalam rangka mengomunikasikan kemanfaatan BPK pada masyarakat/pemangku kepentingan BPK yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan interaksi dengan media terkait hasil pemeriksaan diantaranya melalui *website*, layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), dan publikasi

Laporan Tahunan BPK yang memuat seluruh kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan BPK setiap tahun.

Walau menerapkan gaya komunikasi yang konservatif dan standar, BPK tetap harus lebih proaktif menjalin komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mengakomodir target audiens yang lain seperti masyarakat luas dalam rangka memenuhi ekspektasi dan amanat publik akan peran dan tugas atas eksistensi BPK. Bagaimanapun, SAI harus mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Renata & Zoran (2019) telah menekankan pentingnya SAI membangun komunikasi dua arah yang berarti SAI harus memfasilitasi akses atas laporan kepada seluruh pemangku kepentingan misalnya membuat laporan dan informasi lain tersedia di *website* SAI. Bhatnagar & Sharma (2016) juga menyatakan bahwa SAI harus menjaga komunikasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan karena dapat membantu meningkatkan kualitas data, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik terkait kebijakan dan kinerja pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menciptakan partisipasi dan ketertarikan publik dalam aktivitas audit, dan juga bisa memfasilitasi kerja sama dengan publik untuk memecahkan isu-isu kompleks. Hal ini pada akhirnya dapat menguatkan peran BPK, yang tidak hanya peran *oversight* tapi juga *insight* bahkan *foresight*. Oleh karena itu, BPK perlu meningkatkan kualitas komunikasi melalui kemampuan mengutilisasi dengan optimal saluran-saluran komunikasi baik dalam memenuhi kebutuhan informasi publik maupun dalam menguatkan eksistensinya.

Perbedaan strategi komunikasi dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus diterima sebagai natur kelembagaan BPK. Tapi, hal ini tidak serta merta menjadikan BPK kurang proaktif dalam meningkatkan publisitas media yang dapat mengaburkan peran dan fungsi bahkan eksistensi BPK di mata publik. *Media coverage* perlu lebih dioptimalkan sebagaimana yang diungkapkan Bringselius (2014) bahwa dukungan publik kepada SAI dapat diperoleh melalui peningkatan *media coverage*.

Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan juga harus ditingkatkan. Pelibatan publik tidak hanya sebagai target audiens atas hasil pemeriksaan tetapi juga dapat lebih jauh terutama dalam tahap perencanaan pemeriksaan. BPK melalui situs web resminya, telah berupaya meningkatkan keterlibatan publik tidak saja dalam hal permintaan informasi tapi juga dalam pengaduan masyarakat, keberatan atas informasi, dan survey kepuasan pelayanan. Hal ini sejalan dengan praktik SAI di negara lain, seperti yang diungkapkan oleh Bhatnagar & Sharma (2016) bahwa SAI India melalui situs web telah berusaha menelusuri opini publik atas aktivitas SAI melalui pengawasan informasi dari publikasi, artikel, dan media, serta menyediakan formulir umpan balik di situs web dalam rangka memotivasi publik untuk memberi komentar dan masukan terkait aktivitas SAI. Upaya peningkatan komunikasi dan kerja sama BPK dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi publik yang bersifat edukatif dengan melibatkan kalangan akademisi misalnya, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada akhirnya, kontribusi BPK dalam mengawal penggunaan keuangan negara dapat ditinjau dari kemanfaatan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kontribusi SAI terhadap masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas, integritas, transparansi pemerintah dapat dimaksimalkan jika SAI mampu mengkomunikasikan nilai atas perannya di pemerintah dan hasil kerja SAI kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Bhatnagar & Sharma, 2016). Nasution (2023) juga telah menekankan bahwa pengembangan keterampilan pelaporan dan komunikasi adalah elemen kritis dalam memastikan hasil audit memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus secara proaktif diupayakan oleh BPK melalui berbagai saluran komunikasi jika ingin mengoptimalkan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

## SIMPULAN

Komunikasi publik menjadi penting sebagai strategi lembaga audit sektor publik untuk menguatkan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Penelitian ini menemukan bahwa BPK memiliki gaya komunikasi publik yang cenderung konservatif dan standar. Selain itu, terdapat strategi komunikasi yang berbeda antara BPK dan KPK yang menyebabkan perbedaan skala *media coverage* di mata publik. Hal ini disebabkan natur kelembagaan, termasuk kewenangan, peran, dan fungsi yang berbeda secara fundamental. Namun, walau cenderung kurang proaktif dalam meningkatkan publisitas di media, BPK telah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik akan peran, tugas, dan eksistensi BPK melalui saluran komunikasi yang dimiliki dan aktivitas-aktivitas kelembagaan edukatif yang melibatkan publik misalnya kalangan akademisi. Optimalisasi saluran-saluran komunikasi termasuk media yang mudah dijangkau para pemangku kepentingan terutama publik dalam mendiseminasi hasil audit signifikan dan pelibatan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna hasil pemeriksaan tapi juga terlibat dalam tahapan pemeriksaan seperti memberi input dalam perencanaan pemeriksaan harus dilakukan BPK sebagai cara meningkatkan komunikasi yang efektif.

## Referensi :

- Bastian, I. (2015). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Bhatnagar, P. S., & Sharma, S. (2016). *Enhancing Transparency, Accountability and Effectiveness of Supreme Audit Institutions of India through Communication Network*. LXII(No.1, January-March 2016), 101-110. <https://doi.org/10.1177/0019556120160107>
- BPK. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara* (No. Nomor 1). [https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file\\_storage\\_1484641204.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf)
- Bringselius, L. (2014). The Dissemination of Results from Supreme Audit Institutions: Independent Partners with the Media? *John Wiley & Sons Ltd*, 30(1), 75-94.
- González, B., López, A., & García, R. (2008). Supreme Audit Institutions and their communication strategies. *SAGE Publications (International Review of Administrative Sciences)*, 74(3), 435-461. [https://doi.org/\[DOI:10.1177/0020852308095312\]](https://doi.org/[DOI:10.1177/0020852308095312])

- González-Díaz, B., García-Fernández, R., & López-Díaz, A. (2012). Communication as a Transparency and Accountability Strategy in Supreme Audit Institution. *Administration & Society*, 45(5), 583–609. <https://doi.org/10.1177/0095399712438376>
- Nasution, M. I. (2023). Pengembangan Keterampilan Pelaporan dan Komunikasi Audit Sektor Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu*, 1(2), 95–101.
- Renata, C. K., & Zoran, B. (2019). *The Importance of Efficient Communications of The Audit Institution and Parliament in The Accountability of The Executive Authorities System*. 11(21-22), 159–174. <https://doi.org/10.7251/POS1922159C>
- Rencana Strategis BPK 2020-2024 (2020).